

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada BPKD Kabupaten Manggarai Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan keterlambatan pemrosesan data serta gangguan sistem yang sering terjadi maupun dari segi pengelolaannya.
2. Faktor-faktor pendukung yang dimiliki dalam penerapan SIMDA Keuangan secara optimal adalah: Pelaksanaan SIMDA yang dapat membantu kinerja keuangan pemerintah menjadi lebih baik dan Komunikasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut.
3. Faktor penghambat dalam penerapan SIMDA Keuangan : Sumber Daya Manusia belum efektif masih memiliki kekurangan dari segi kualitas dan kuantitas dan perawatan server masih bergantung dengan pihak pemasok dengan sistem kontrak tahunan

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlunya pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia

(SDM) dari segi kualitas dan kuantitas yang dimiliki dan lebih memahami mengenai proses penerapan SIMDA Keuangan itu sendiri agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhasani, A., (2014). Kajian Implementasi Kebijakan Publik Menurut para ahli. (<http://www.administrasipublik.com/2014/08/kajian-implementasi-kebijakan-publik.html>)
- Arinkunto, S., 2008. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (edisi keempat). Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2008. *Tujuan dan Manfaat SIMDA Keuangan*. Jakarta
- Dunn, W.N., 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Eka. 2008. *Sistem Informasi Manajemen, konsep, Aplikasi dan Perkembangan*. Yogyakarta. Andi.
- Sofana, Iwan. 2012. *Cloud Computing – Teori dan Praktik (OpenNebula, VMWare, dan Amazon AWS)*. Bandung. Informatika.
- Sugiyono. (2014). *Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono., (2016). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>, diakses tanggal 12 Pebruari 2017
- Wahab, A. Solichin. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Yusuf, A.M., 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Pratama, S. Y. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 4(2), 153-169.

Rodriguez, Marylen D. dan Gilbert R. Hufana. 2013. DMMMSU-MLUC Research Information and Management System. E – *International Scientific Research Journal*, Volume – V, Issue – 1, 2013, ISSN 2094 – 1749 pp 76-89

Supriyanto. 2015. Analisis Implementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* – Vol. 13

<http://grhasia.jogjaprov.go.id/berita/101/sistem-informasi-pengelolaan-keuangan-daerah.html>